

**PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG  
MELANGGAR TATA TERTIB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA NO.6 TAHUN 2013 TENTANG  
TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH  
TAHANAN NEGARA DALAM KAITANNYA  
DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA  
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak)  
Oleh :**

**POLYCARPUS BAGUS WIDIHARSO SANTOSO, SH  
A.2021141030**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Kamarullah,SH.,M.Hum**

**Pembimbing II : Edy Suasono,SH.,M.Hum**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the implementation of disciplinary punishment against inmates who violate the order based on the Minister of Justice and Human Rights of 6 Year 2013 About the Penitentiary Code and State Prison Inmates In Relation With Development (Study In Penitentiary Class II A Pontianak). The method used in this research is juridical - sociological. From the results of this thesis can be concluded that administrative sanctions for Citizens Patronage of Corrections in violation of Article 4 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 6 of 2013, namely the offense in the form of minor violations, violations of moderate and severe abuses. Enacted to all prisoners who are in prison, with the purpose of disciplinary punishment as a form of administrative sanction to improve and educate prisoners who commit disciplinary offenses. Law enforcement is needed in the handling of violations of disciplinary rules Patronage Citizen Pemasyarakatan. Dalam implementation, implementation procedure of administrative sanctions for prisoners are appropriately focused on correctional officers should be required to re-examine the prisoners in accordance with the flow mechanism disciplinary offense, with the aim of know the offense that has been done. In this case, the sense of justice and security in the cell correctional preferred, if the prisoners had done the previous violation, then the officer would sanction proportionate and of course the sanction to be more severe than disciplinary punishment ever meted out to him, but they can only sentenced to one sentence only. Factors - factors that affect the prisoners so that legal violations of discipline by inmates at the Correctional Institution Class II A Pontianak is an external factor which is the capacity lockup inadequate to the limited space for prisoners, resulting in the instability of the emotions of the prisoners. Internal factors, namely individual issue, in the form of public or private matter that makes the mind of prisoners, so that has always been overshadowed by a sense of annoyance, saturated and demeanor that kept emotions. The lack of positive activities more varied for female prisoners who want to distribute their creative ideas, but because so much free time but not implemented well, the women prisoners are also experiencing saturation so the effect on the state of mind of a tahanan. Upaya Prison Class IIA Pontianak to prevent violations of discipline by inmates unified security monitoring in all rooms and places where prisoners perform everyday activities for 1x24 hours. In addition, each block is guarded by a picket public. Piket general in charge of guarding prisoners and ensure that no disturbances in Penitentiary.

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis - sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yaitu pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, rasa keadilan dan keamanan di dalam sel pemasyarakatan lebih diutamakan, jika warga binaan pemasyarakatan pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, maka petugas akan memberikan sanksi yang setimpal dan pastinya sanksi yang diberikan akan lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya, namun hanya dapat dijatuhi satu hukuman saja. Faktor – faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak adalah Faktor eksternal yakni kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan. Faktor internal yakni Masalah individu, yang berupa masalah umum maupun pribadi yang menjadikan beban pikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi. Kurangnya kegiatan positif yang lebih bervariasi bagi tahanan wanita yang ingin menyalurkan ide kreatif mereka, selain karena waktu luang yang begitu banyak namun tak terimplementasi dengan baik, para tahanan wanita juga mengalami kejenuhan sehingga berpengaruh pada kondisi jiwa seorang tahanan. Upaya Lapas Kelas IIA Pontianak untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh narapidana kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat- tempat tahanan melakukan kegiatan sehari- hari selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Hukuman Disiplin, Terhadap Narapidana, Yang Melanggar Tata tertib.**

## **Latar Belakang**

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjeraan, dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melakukan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan. Gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo,SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari (a) Tingkat hukuman disiplin ringan (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan (c) Tingkat hukuman disiplin berat.

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Dengan Kabid Tatib, Pada Tanggal 12 Agustus 2015, pukul 09.00 WIB

Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
  - a. memberikan peringatan secara lisan
  - b. memberikan peringatan secara tertulis
2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
  - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
  - b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
  - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
  - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengujung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Hampir semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak yang melakukan pelanggaran disiplin yang dilakukan tersebut karena penyalahgunaan handphone dan penyalahgunaan narkoba di dalam Blok-Blok kamar yang ditempati oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, dan tidak hanya itu saja ada juga yang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap sesama Narapidana lainnya di dalam Lapas, entah itu alasan tidak cocok ataupun karena kesalahpahaman saja yang membuat antar Narapidana tersebut melakukan tindakan penganiayaan atau pemukulan.

Padahal semua Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dengan Narapidana ataupun Tahanan sebelumnya sudah diberitahu tentang peraturan tata tertib didalam Lapas serta sanksi-sanksinya oleh Petugas Pemasyarakatan, tetapi masih banyak Narapidana-Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas. Hukuman yang diberikan oleh Petugas Pemasyarakatan kepada Narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena di lingkup Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak telah memakai Peraturan tersebut.

Seharusnya hukuman disiplin tersebut menjadi efek jera bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi, tetapi kenyataan yang ada itu tidak dapat memberhentikan Narapidana untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat di dalam Lapas.

Teori yang digunakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak sanksi yang digunakan adalah pengenaan denda administratif karena bukan hanya reaksi terhadap pelanggaran norma saja yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis dan itu sudah efektif digunakan dan mengacu pada peraturan yang sudah ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dari laporan ringkasan berita acara pemeriksaan, kebanyakan pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam Lapas adalah penyalahgunaan mengkonsumsi narkoba dan membawa handphone di dalam lingkup Lapas.

Narapidana berinisial AY (31) narapidana kasus narkoba mengatakan bahwa dirinya melakukan pemukulan terhadap salah satu napi di dalam Klas II A Pontianak dan telah menyesal bersalah dan tidak akan mengulangi lagi serta bersedia ditindak sesuai peraturan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dan memohon agar dihukum ringan-ringannya, tidak dicabut remisinya dan tidak dipindahkan.<sup>2</sup>

Berbeda dengan Narapidana berinisial AY, Narapidana Berinisial RH (28) narapidana kasus narkoba ini ketahuan sedang membawa 1 unit handphone yang dia beli pada salah satu napi yang pada waktu itu mau bebas dengan harga 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lengkap dengan kartu dan chargernya, dia mengatakan bahwa menyimpan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Narapidana yang melakukan pelanggaran bernisial AY pada tanggal 12 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB.

handphonenya di almari pakaian, kalau tidak butuh dia sembuhkan diluar depan kamar dengan cara dipendam.<sup>3</sup>

Kesesuaian tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak sudah efektif karena menggunakan dan melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 dan peraturan lain yang sudah ada. Dalam segi sasarannya dapat dilihat bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam sanksi punitif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang yaitu narapidana misalnya berupa sanksi administratif yang diberikan.

Kendala yang muncul ketika dalam memberikan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu<sup>4</sup> :

1. Yang bersangkutan masih berstatus sebagai Tahanan
2. Efektif hukuman disiplinnya menunggu putusan Pengadilan, setelah menjadi Narapidana baru bisa Hukuman Disiplinnya dilaksanakan.

Tahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, Tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dan selama proses tersebut tersangka atau terdakwa di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pihak - pihak yang berhak menahan adalah :

- a. Penyidik, yaitu polisi atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan pengumpulan bukti
- b. Penuntut Umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh UndangUndang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
- c. Hakim, baik hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, yaitu pejabat

Umumnya orang menganggap bahwa ditahan sama dengan dipenjara, Padahal tidak demikian, Seseorang ditahan jika diduga keras melakukan kejahatan, karenanya

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Narapidana yang melakukan pelanggaran berinisial RH pada tanggal 12 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kamtib tanggal 12 Agustus 2015, pukul 09.00 WIB

untuk sementara dia dimasukkan ke dalam tahanan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dari perkara yang disangkakan kepadanya. Berarti dia belum tentu bersalah dan bisa saja dibebaskan bila dalam penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tidak ditemukan bukti bahwa dia bersalah. Sedangkan seseorang dipenjara karena dia telah terbukti melakukan kejahatan dan telah menerima keputusan hakim (vonis) yang bersifat tetap.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak LAPAS selama ini sudah maksimal. Dalam memberikan Sanksi Administrasi yaitu berupa Pelanggaran Disiplin kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran di dalam LAPAS, Upaya-upaya yang dilakukan Petugas LAPAS dalam memberikan Sanksi Administasi juga dinilai sudah konkrit dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat melakukan hukuman terhadap yang bersangkutan berstatus tahanan, namun menunggu terlebih dahulu Putusan Pengadilan terlebih dahulu sampai menjadi Narapidana baru bisa hukumannya diberikan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib yang melanggar Tata-Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak Dalam Kaitanya dengan pembinaan Narapidana ?
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pontianak ditinjau dari peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara ?

### **Pembahasan**

#### **A. Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib yang melanggar Tata-Tertib Dalam Hubungannya Dengan Pembinaan Narapida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak.**

Pembangunan barulah dapat terselenggara dengan baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang baik pula, dan memberikan penciptaan kondisi yang memungkinkan dalam



pelaksanaan pembangunan. Dalam hal inilah pemsyarakat penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemsyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep pemsyarakatan pada hakekatnya adalah juga pemsyarakat pancasila yang ikut berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pembangunan.

Di Lembaga Pemsyarakatan (Lapas), narapidana berhak menerima pembinaan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Wujud pembinaan yang wajib diberikan kepada narapidana adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terkait dengan pengembangan karakter dan mental, sedangkan pembinaan kemandirian terkait dengan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana.

Sistem pemsyarakatan sebagai reaksi formal terhadap terpidana yang dikenal saat ini tidak lagi menggunakan konsep penjeraan sebagaimana yang dianut dalam sistem kepenjaraan melainkan telah beralih pada konsep pembinaan. Di dalam sistem ini terdapat 3 (tiga) unsur yang saling terkait guna mendukung tercapainya tujuan pemsyarakatan, yaitu narapidana, petugas pemsyarakatan dan masyarakat. Jika salah satu unsur tidak memberi peran positif dalam proses pemsyarakatan, besar kemungkinan upaya pengentasan narapidana tidak akan berhasil.

Secara umum diketahui bahwa pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemsyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemsyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana

bahagia hidup di dunia dan diakherat. Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, dapat dikemukakan bahwa Pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik, sesuai dengan pedoman dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pembinaan akhlak dan moral, budi pekerti, siraman rohani, latihan keterampilan, dan lain sebagainya. Pola pembinaan juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat. Namun belum maksimal sesuai dengan harapan, hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana penunjang pembinaan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya perhatian/dukungan dari pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Berdasarkan buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, terlihat bahwa pada tahun 2014 terjadi 7 (tujuh) orang yang melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh narapidana yaitu melakukan tindakan kekerasan terhadap warga binaan lainnya dan melakukan percobaan pelarian dari lembaga pemasyarakatan. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa narapidana tersebut tindakan disiplin yang diberikan oleh Kalapas adalah berupa memproses tindakan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu kepada pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menjatuhkan hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari. Apabila narapidana yang telah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, dan kemudian mengulangi pelanggaran keamanan dan ketertiban dan berusaha melarikan diri maka mereka akan dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari.

Berdasarkan buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak pada tahun 2015 proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana bagi narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak mengacu kepada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dimana sejumlah narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban pada tahun 2015 dalam hal penyalahgunaan Narkoba. Oleh karena itu Kalapas dalam mengambil tindakan penjatuhan hukuman disiplin selain menerapkan hukuman tutupan sunyi diambil tindakan tambahan yaitu menjatuhkan hukuman menunda dan/atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan petugas penjara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak.

waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hak mendapatkan remisi, hak mendapatkan cuti bebas bersyarat dan hak mendapatkan cuti bersyarat.

Dalam hal pelanggaran keamanan dan ketertiban penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak tergolong ke dalam tindakan pidana, maka Kalapas menyerahkan proses pemeriksaan tindak pidana Lapas bekerja sama dengan kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Minkamtib pada tanggal 4 Februari 2016 menyatakan bahwa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sebagaimana pelaksanaan diatur oleh **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013** dimana tertuang tindakan disiplin bagi narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban.<sup>6</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan pada saat narapidana dalam proses tindakan disiplin dibahas oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan KALAPAS dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Sidang TPP berlangsung setiap waktu sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Keputusan hasil sidang TPP dapat dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari anggota TPP yang hadir. Setiap selesai dilaksanakan sidang TPP, diajukan berita acara persidangan dan setiap hasil sidang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta anggota TPP yang hadir. Hasil keputusan sidang TPP diajukan kepada Kalapas untuk mendapat persetujuan pengesahan. Hukuman disiplin dapat berupa:

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari, dan/atau
- b. Menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari. Adapun jenis- jenis pelanggaran keamanan dan ketertiban yang pernah dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain:

1. Narapidana melarikan diri,
2. Membuat keributan,
3. Melanggar peraturan,

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Minkamtib Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 4 Februari 2016

4. Mencoba melarikan diri,
5. Memakai menyimpan dan mengedarkan Narkoba,
6. Memakai menyimpan dan menyalahgunakan Handphone (HP), Berkelahi menghasut dan memberontak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dimana narapidana yang melanggar peraturan dan telah di tindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.<sup>7</sup> Adapun wujud pembinaan yang dilakukan adalah:

1. Pendidikan umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka, dan buta bahasa) melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan Pamong dan Tutor para pegawai Lapas/Rutan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendidikan keterampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambakan dan pabrik/industri dan sebagainya.
3. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama dan Budi pekerti. Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap penting dalam pembinaan karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati. Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dalam pembinaan mental selama penulis melakukan pengamatan di lapangan, dijumpai bahwa para narapidana diberi ceramah agama yang dilakukan oleh tokoh agama baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Sarana dan prasarana pembinaan mental yaitu telah disediakan Mesjid bagi yang beragama Islam dan ruang khusus bagi yang non muslim. Hal ini dilakukan untuk memberikan pembekalan yang lebih mendalam agar para narapidana dapat memahami bahwa perbuatannya dapat merusak mental.

Dengan demikian selama menjalani masa pidananya narapidana dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada di dalam

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang tanggal 8 Juni 2015

lembaga pemasyarakatan, dan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, narapidana:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

## **B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.**

### **1. Faktor-Faktor yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib**

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. penegakan hukum sangat

diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di jelaskan bahwa :

#### Pasal 4

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Bimbingan Hukum dan Penyuluhan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses di dalam lembaga pemasyarakatan yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel pengasingan. Kasus yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan adalah kasus perkelahian antar sesama napi. Ketika terjadi perkelahian maka petugas segera melakukan tindakan peleraian dan mencari tahu sebab-sebab terjadinya perkelahian tersebut. Langkah awal yang dilakukan oleh petugas adalah berupaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang saling berseteru agar tercapainya upaya damai. Namun jika ternyata perkelahian tersebut masih berlanjut, maka petugas Lapas akan menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan pada ruang khusus pengasingan yang biasa disebut dengan sel merah. Sel tersebut merupakan sel penahanan yang berada jauh dari sel lainnya. Setelah diberikan sanksi sel merah, kegiatan tahanan bersangkutan juga dibatasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, tergantung dari kasus pelanggaran yang dilakukan. Dalam wawancara tersebut Kepala Bimbingan Hukum dan Penyuluhan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin hukum terkait dengan perkelahian antar napi di dalam lembaga pemasyarakatan:

#### 1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Pontianak. Kapasitas kamar yang tidak memadai adalah salah satu faktor eksternal yang memicu terjadinya perkelahian antar sesama tahanan. Banyaknya jumlah penghuni kamar dan juga ruang gerak yang dibatasi menyebabkan emosi dari tahanan itu sendiri tidak stabil.

## 2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap tahanan, baik permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan memiliki tingkat sensitive yang tinggi dan ketika emosi, pertengkaran merupakan hal yang tak dapat dihindarkan antar sesama tahanan. Dalam kesempatan yang sama, penulis diberikan kesempatan oleh petugas Rutan untuk melakukan wawancara dengan beberapa tahanan yang pernah terlibat kasus perkelahian antar sesama tahanan wanita di dalam Rutan. Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

### a. Ita

Ita merupakan salah satu tahanan wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak yang di Tahan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Ika mengaku melakukan perkelahian antar sesama tahanan wanita awalnya karena merasa pembagian tugas dalam merawat dan menjaga kebersihan kamar tidaklah adil. Ita mengaku awalnya dirinya dapat menerima perlakuan tersebut, namun setelah beberapa minggu akhirnya ia memberanikan diri mengeluarkan keluhan kesahnya dalam pembagian tugas tersebut. Namun bukanlah respon yang baik yang didapatkan oleh ika, justru sebaliknya ita malah mendapatkan cemoohan dan teman sekamarnya berbalik menyalahkannya akibat keluhan yang ia sampaikan. Tak menerima hal tersebut pertengkaran antar sesama tahanan pun tak terhindarkan.

### b. Bella

Bella merupakan tahanan Pria pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak yang di Tahan sebagai tersangka kasus narkoba. Bella melakukan perkelahian terhadap sesama tahanan pria karena merasa tidak senang dengan perilaku teman sekamarnya yang telah bersuami namun berselingkuh di dalam tahanan dengan tahanan lelaki di Rutan tersebut. Teman sekamarnya berselingkuh dengan tahanan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pontianak.



laki-laki yang ternyata merupakan suami dari sahabatnya. Tak segan, akhirnya Bella pun menegur Dian teman kamarnya itu untuk berhenti berhubungan dengan tahanan lelaki yang berstatus sebagai suami dari sahabatnya. Merasa tersinggung, Dian pun dengan emosi yang tak terkendali mencaci sembari menyangkal atas hal yang telah dituduhkan Bella. Tak terima dengan perkataan yang keluar dengan tidak sopan dari mulut Dian, Farah langsung menarik rambut Dian dan perkelahian pun tak terhindarkan. Namun segera seluruh teman kamar di dalam sel tersebut langsung meleraikan sehingga tak ada yang terluka. Pada kesempatan yang sama penulis juga menyinggung mengenai aturan hukum yang berlaku serta sanksi yang diberikan bila ada seorang tahanan yang melakukan pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak. Ita dan Bella mengaku mereka mengetahui bahwa perkelahian merupakan salah satu jenis perbuatan pelanggaran dan harus dihindari oleh setiap tahanan, dikarenakan mereka hidup bersama – sama dalam satu lingkungan, sehingga penting untuk saling lebih menghargai satu sama lain demi terciptanya kehidupan yang tertib di dalam Rutan. Tidak hanya itu mereka berdua juga mengetahui bahwa sanksi yang diberikan jika seorang tahanan melakukan perbuatan pelanggaran perkelahian maka petugas Lapas akan menindak lanjuti dan memberikan sanksi sel pengasingan atau biasa disebut dengan sel merah pada tahanan yang melakukan perkelahian. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa :

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplinterhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
  - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
  - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan

b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.

- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Disela waktu yang sama ketika diminta mengenai adakah saran yang ingin mereka berikan, Ita dan Bella berharap pihak Lapas dapat memberikan kegiatan yang lebih kreatif lagi khususnya bagi tahanan wanita seperti menjahit maupun menyulam. Hal ini penting bagi mereka dalam mengisi waktu luang serta dapat menghilangkan kejenuhan di dalam Lapas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa tahanan yang pernah terlibat perkelahian di Lapas penulis menemukan satu faktor lagi, meskipun hal tersebut merupakan hal kecil karena faktor tersebut adalah kurangnya kegiatan pengisi waktu luang bagi tahanan, khususnya tahanan wanita yang lebih menginginkan lebih banyak kegiatan kreatif sehingga dapat tersalurkan waktu luang dengan kegiatan positif serta hilangnya rasa jenuh para tahanan.

Berdasarkan penelitian Penulis pada kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, Penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya perkelahian antar sesama tahanan wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak adalah :

- 1) Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak khususnya kapasitas kamar tahanan yang kurang memadai, yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan.
- 2) Masalah Individu, yang dapat bersifat pribadi maupun bersifat umum sehingga menjadikan beban pikiran yang akhirnya selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan berakhir dengan emosi yang dilimpahkan dengan kemarahan.
- 3) Kurangnya kegiatan positif bagi tahanan yang ingin menyalurkan ide kreatif mereka, selain karena waktu luang yang begitu banyak namun tak terimplementasi dengan baik, para tahanan wanita juga mengalami kejenuhan sehingga berpengaruh pada kondisi jiwa seorang tahanan. Hal ini menyebabkan masalah yang sebenarnya adalah masalah kecil dapat menjadi masalah besar dan perkelahian antar sesama tahanan wanita pun tak dapat dihindarkan.

## **2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak Dalam Menanggulangi Pelanggaran Keamanan Dan Ketertiban Oleh Narapidana.**

Dalam upaya pelaksanaan hukum disiplin kepada narapidana dalam rangka pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, maka dalam kesempatan yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan petugas kesatuan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak. Petugas LP mengungkapkan bahwa pelanggaran yang terjadi antar sesama tahanan seperti contoh kasus perkelahian disebabkan karena banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana, selain itu masalah individu juga sangat memicu timbulnya masalah di dalam tahanan. Untungnya sejauh ini pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana di tangani dengan baik oleh petugas Lapas sehingga tidak ada jatuhnya korban.

Setelah penulis mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, penulis kemudian melakukan penelitian mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan kepada tahanan yang melakukan pelanggaran serta upaya yang dilakukan petugas Rutan dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar sesama tahanan wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.

Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas lapas kepada tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain :

- a. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahan/ narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
- b. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/ narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.
- c. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/ narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.

Penerapan sanksi diatas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di dalam lapas.

Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Bimbingan Hukum dan Penyuluhan Lapas menunjukkan bahwa dalam menyatakan dalam melaksanakan tugas teknis

pengamanan (penerimaan, pengawasan, penempatan Tahanan/ Narapidana) petugas keamanan melakukan :

- a. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dan tahanan.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan.

Selain itu untuk memastikan di taatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan oleh 12 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) shift. Selang waktu dari shift pertama ke shift yang kedua adalah sekitar 5 sampai dengan 6 jam, yaitu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, dan jam 1 siang sampai dengan jam 6 malam. Untuk shift malam, dimulai dari jam 6 malam sampai dengan jam 7 pagi. Tiap shift akan dibantu oleh pembina blok. Setiap blok terdapat piket umum dan piket klinik. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan, sementara piket klinik bertugas menjaga tahanan yang sementara sakit. Jumlah kesatuan pengamanan adalah 26 (dua puluh enam) orang, dan petugas pengamanan/ penjagaan berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.

Dengan adanya mekanisme system pengawasan ini, penulis beranggapan bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana. Hanya saja para sipir diharapkan mampu memaksimalkan mekanisme ini, sehingga diharapkan tidak adanya perkelahian yang lolos dari pengawasan petugas apalagi sampai jatuhnya korban jiwa.

Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh tahanan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika dampak dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan menyebabkan kematian, maka petugas lapas akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Bagi tahanan yang melakukan pelanggaran ketertiban, mereka akan diasingkan pada sel pengasingan yang berada jauh dari sel tahanan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kejadian yang sama, diakrenakan masih adanya dendam antara tahanan yang melakukan perkelahian.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yaitu pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, rasa keadilan dan keamanan di dalam sel pemasyarakatan lebih diutamakan, jika warga binaan pemasyarakatan pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, maka petugas akan memberikan sanksi yang setimpal dan pastinya sanksi yang diberikan akan lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya, namun hanya dapat dijatuhi satu hukuman saja.
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak adalah Faktor eksternal yakni kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan. Faktor internal yakni Masalah individu, yang berupa masalah umum maupun pribadi yang menjadikan beban pikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi. Kurangnya kegiatan positif yang lebih bervariasi bagi tahanan wanita yang ingin menyalurkan ide kreatif mereka, selain karena waktu luang yang begitu banyak namun tak terimplementasi dengan baik, para tahanan wanita juga mengalami kejenuhan sehingga berpengaruh pada kondisi jiwa seorang tahanan.

4. Upaya Lapas Kelas IIA Pontianak untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh narapidana kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat- tempat tahanan melakukan kegiatan sehari- hari selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke reformasi), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 92.
- Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung: Bina Cipta, 1985.
- Andi Malarangeng, dkk, 2001, *Otonomi Derah Perspektif Teoretis dan Praktis*, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1993.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2002.
- Bintoro, Tjokroamidjojo, 1976, *Analisis Kebijakan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional*, Dalam Majalah Administrator, No, 5 dan 6 Tahun IV.
- Bruce Mitchell, dkk, 2000, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Edisi Pertama, gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Eddy Wibowo, dkk., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penertbit YPAPI, Yogyakarta.
- Edy Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hamid S. Attamimi, “*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Mengenai Analisis Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*”, Disertasi Doktor (S3), Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Andreas Wedberg, New York: Russel and Russel, 1961.
- Haposan Siallagan, *Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Medan: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari (Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung), Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2001.



- Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan I, Jakarta: Ind Hill-Co., 1997.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, S., 1988, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Samosir Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hal., 4
- Suhariyono, *Peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Prolegda*, Dalam Bimbingan Teknis Proglam Legislasi Daerah, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamoedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soenyono, 2001, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Dalam Buku Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis Oleh Andi A. Malarangeng, dkk, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta.